

BAB I

PENDAULUAN

1.1. Latar Belakang

Desentralisasi merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat diserahkan kepada pemerintah daerah. Tugas tersebut dilaksanakan pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada perundang undangan yaitu Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat sebagai perubahan dari Undang Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang Undang No. 25 Tahun 1999. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari

pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan. Dalam (Hidayat dan Ghozali, 2013).

Mahmudi (2019, hal 135) mengemukakan bahwa analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Analisis selisih anggaran pendapatan dapat dilakukan menggunakan beberapa langkah berikut ini: pertama, membandingkan antara anggaran dan realisasi pendapatan, jika terdapat selisih kemudian tentukan selisihnya berdasarkan persentase atau nominal. Setelah menentukan kewajaran selisih tersebut, bandingkan selisih tersebut dengan total pendapatan apakah signifikan atau tidak signifikan. Langkah terakhir dari analisis selisih anggaran yaitu cari akar masalah penyebab selisih tersebut terjadi. (Elfita E. W,2022).

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan

Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya. (Bahrin. A, 2014).

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2004:182).

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominal atau persentasenya. Kinerja pemerintah daerah dinilai kurang baik jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja melebihi jumlah yang dianggarkan) sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang

dianggarkan) maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Belanja Daerah dinilai baik (Mahmudi, 2010). (Karlina, A., Andayani, N, 2017).

Analisis pertumbuhan belanja untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun mengenai seberapa besar anggaran dan realisasi yang terwujud. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikannya biasanya dikaitkan dengan penyesuaian inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka mencegah dapat mengganggu keseimbangan dan kesehatan fiskal daerah (Mahmudi, 2011:162). (Elfita E. W,2022).

Mahmudi (2010) Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut tetapi relatif, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiennya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengidentifikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.(Fathiyah, Abdi .S dan dkk, 2021)

Oleh karena itu usaha pemerintah daerah dalam mencapai tujuan sasaran menggunakan anggaran sebagai alat untuk mengukur perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sebagai rencana operasi keuangan yang

mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang hendak dicapai dalam satu periode (Bastian, 2018).

Salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah (Mardiasmo, 2002:11). Bastian (2001:6) menyatakan bahwa diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumberdaya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintahan daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomi daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah. Undang -undang No. 17 tahun 2013 menetapkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD) di susun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu di bangun pendekatan kinerja. (Karlina, A., Andayani, N, 2017).

Pemerintah daerah dikatakan mempunyai kinerja pendapatan yang baik jika bisa mendapatkan pendapatan yang lebih dari total yang sudah dianggarkan (Mardiasmo, 2005), namun jika realisasi pendapatan di bawah total anggaran, maka hal tersebut dinilai kurang baik (Asmara, 2010). Jika sasaran pendapatan bisa didapatkan atau melebihi, maka hal tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan karena hal tersebut dianggap wajar, namun jika sasaran pendapatan tidak sesuai maka hal ini membutuhkan perhatian yang lebih lanjut yang berkaitan dengan mengapa sasaran/target tersebut tidak bisa dicapai (Assidiqi, 2016). (Purnama Sari& Agus Baku, 2022)

Sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kupang yang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur juga ikut melaksanakan otonomi daerah dengan mengelola secara mandiri dan memanfaatkan sejumlah sumber daya yang dimilikinya. Kinerja dari sebuah pemerintahan menunjukkan bagaimana pelaksanaan dari otonomi daerah tersebut berjalan, sehingga hal tersebut sangat penting untuk dilihat dan diukur. Karena keberhasilan dari suatu pemerintahan dapat dilihat dengan berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Kinerja itu sendiri merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi pemerintah. (Saputra, Suwendra & Yudiaatmaja, 2018). Tetapi Simanjuntak menyatakan bahwa hingga saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Realita menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat didalam mengatur rumah tangga daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antar pusat dan daerah (Karlina & Handayani, 2017).

Kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan

efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. (Erlina, Rambe & Rasdianto, 2015: 19-20).

Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) dan hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai (Halim, 2012: L-4). Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi, selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah (Yanti, 2013: 445).

Beberapa permasalahan kinerja keuangan daerah yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, antara lain yaitu : 1). Terjadinya defisit dikarenakan realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan, 2). Terjadinya surplus dikarenakan realisasi pendapatan lebih besar dari realisasi belanja, 3). Pada realisasi pertumbuhan pendapatan dan realisasi pertumbuhan belanja mengalami fluktuasi dikarenakan realisasinya tidak mencapai target.

Kabupaten Kupang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana Ibu Kota Kabupaten terletak di Oelamasi. Kabupaten Kupang memiliki tingkat penduduk 366.383 jiwa, dan kepadatan penduduk 69 jiwa/km² (BPS, 2020).

Tabel 1.1.
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
DiKabupaten Kupang Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Selisih
2017	Rp.1.141.043.758.854,-	RP.1.220.116.670.345,-	(79.072.911.491)
2018	Rp.1.236.846.999.491,-	RP.1.221.688.581.122,-	15.158.418.369
2019	Rp.1.266.901.145.258,-	RP.1.211.863.528.921,-	55.037.616.337
2020	Rp. 1.175.919.425.857,-	RP.1.149.687.557..091,-	(26.231.868.767)
2021	Rp.1.161,477.530.683,-	RP.1.185.890.563.525,-	(24.413.032.842)

Sumber: BPKAD Kab. Kupang, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahawa Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kupang tahun 2017 disimpulkan bahwa realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp.1.141.043.758.854, dan pada realisasi anggaran belanja sebesar Rp.1.220.116.670.345, dapat dikatakan bahwa terjadi defisit karena ditahun 2017 ralisasi belanja lebih besar dari pada realisasi anggaran pendapatan dengan selisih sebesar (-79.072.911.491), sehingga dana yang digunakan untuk menutupi sisa realisasi anggaran belanja pemerintah kab. kupang diambil dari penerimaan pembiayaan daerah dan dapat dikatakan bahwa kinerja pengelolaan keuangan pemerintah kab. kupang kurang baik. Kemudian ditahun 2018 realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp.1.236.846.999.491, dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.1.221.688.581.122, sehingga dikatakan bahwa terjadi surplus karena pada tahun 2018 ralisasi anggaran pendapatan lebih besar dari pada realisasi anggaran belanja dengan selisih sebesar (15.158.418.369), sehinga sisa dana lebih dari realisasi anggaran pendapatan di masukan ke rekening kas umum daerah pemerintah kab. kupang dan dapat dikatakan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerahnya baik. Dan dilihat dari

tingkat presentase dari tahun 2017 sebesar 1,14%, dan pada tahun 2018 sebesar 2,89%, dapat dikatakan pada realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja mengalami peningkatan.

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahawa Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah di Kab. Kupang tahun 2018 disimpulkan bahwa pada tahun 2018 realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp.1.236.846.999.491, dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.1.221.688.581.122, dapat dikatakan bahwa terjadi surplus karena pada tahun 2018 ralisasi anggaran pendapatan lebih besar dari pada realisasi anggaran belanja dengan selisih sebesar (15.158.418.369), sehingga sisa dana lebih dari anggaran pendapatan di masukan ke rekening kas umum daerah pemerintah kab. kupang sehingga dikatakan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerahnya baik. Kemudian ditahun 2019 realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp.1.266.901.145.258, dan realisasi angaran belanja sebesar Rp.1.211.863.528.921, dapat dikatakan bahwa terjadi surplus karena pada tahun 2019 ralisasi anggaran pendapatan lebih besar dari pada realisasi anggaran belanja dengan selisih sebesar (55.037.616.337), sehingga sisa dana lebih dari realisasi anggaran pendapatan di masukan ke rekening kas umum daerah pemerintah kab kupang dan dapat dikatakan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerahnya baik. Dilihat dari tingkat presentase dari tahun 2018 sebesar 2,89%, dan pada tahun 2019 sebesar 6,91%, dapat dikatakan pada realisasi anggran pendapatan dan realisasi anggaran belanja mengalami peningkatan.

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahawa Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah di Kab. Kupang pada tahun 2019 disimpulkan bahwa pada

tahun 2019 realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp.1.266.901.145.258, dan pada anggaran realisasi belanja sebesar Rp.1.211.863.528.921, dapat dikatakan bahwa terdapat surplus karena ditahun 2019 ralisasi anggaran pendapatan lebih besar dari pada realisasi anggaran belanja dengan selisih sebesar (55.037.616.337), sehingga sisa dana lebih dari anggaran pendapatan di masukan ke rekening kas umum daerah pemerintah kab kupang dan dapat dikatakan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerahnya baik. Kemudian ditahun 2020 realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp.1.175.919.425.857, dan pada anggaran realisasi belanja sebesar Rp.1.149.687.557.091, dapat dikatakan bahwa terjadi surplus karena pada tahun 2019 ralisasi anggaran pendapatan lebih besar dari pada realisasi anggaran belanja dengan selisih sebesar (-26.231.868.767), sehingga sisa dana lebih dari anggaran pendapatan di masukan ke rekening kas umum daerah pemerintah kab kupang dan dapat dikatakan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerahnya baik. Dan dilihat dari tingkat presentase dari tahun 2019 sebesar 26,91%, dan pada tahun 2020 sebesar 18,72%, dapat dikatakan pada realisasi anggran pendapatan dan realisasi anggaran belanja mengalami peningkatan.

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahawa Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah di Kab. Kupang pada tahun 2020 disimpulkan bahawa realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp.1.175.919.425.857, dan pada anggaran realisasi belanja sebesar Rp.1.149.687.557.091, dapat dikatakan bahwa terjadi surplus karena ditahun 2020 ralisasi anggaran pendapatan lebih besar dari pada realisasi anggaran belanja dengan selisih sebesar (-26.231.868.767), sehingga sisa dana lebih dari anggaran pendapatan di masukan ke rekening kas umum daerah

pemerintah kab. kupang dan dapat dikatakan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerahnya baik. Kemudian ditahun 2021 Realisasi Anggaran Pendapatan sebesar Rp.1.161,477.530.683, dan pada anggaran realisasi belanja sebesar Rp.1.185.890.563, dapat dikatakan bahwa terdapat surplus karena pada tahun 2021 ralisasi belanjanya lebih besar dari pada realisasi anggaran pendapatan dengan selisih sebesar (-24.413.032.824), sehingga dana yang digunakan untuk menutupi sisa anggaran belanja pemerintah kab. kupang diambil dari penerimaan pembiayaan daerah dan dapat dikatakan bahwa kinerja pengelolaan keuangan pemerinta kab. kupang buruk. Dan dilihat dari tingkat presentase dari tahun 2020 sebesar 18,72%, dan pada tahun 2021 sebesar 5,66%, dapat dikatakan pada realisasi anggran pendapatan dan realisasi anggaran belanja mengalami penurunan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini. Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah dari Sandy Candra Saputra¹, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja, (2018) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana“ dari hasil penelitian ini menunjukkan hasil penelitian bahwa (1) varian pendapatan termasuk dalam kategori. (2) rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategorisangat kurang. (3) tingkat kemandirian keuangan daerah masuk dalam kategori sangat rendah. (4) rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif. (5) varian belanja termasuk dalam kategori baik. (6) rasio keserasian belanja

menunjukkan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional. (7) rasio efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisien.

Penelitian lain yang dilakukan oleh: Anis Karlina dan Nur Handayani dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2012-2015” : dari hasil analisis penelitian ini menunjukkan hasil penelitian bahwa : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya secara umum dikatakan kurang baik dalam varians pendapatan. Hal ini dibuktikan (1) varians pendapatan termasuk dalam kategori kurang baik. (2) Rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang. (3) Rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori sangat rendah. (4) Rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhannya positif. (5) varians belanja termasuk dalam kategori baik. (6) rasio keserasian belanja menunjukkan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional dan belanja modal. (7) rasio efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisien.

Dan penelitian lain yang dilakukan oleh: Rani Febri Ramadani. Elfreda Aplonia Lau, Suyatin dengan judul ”Analisis Kinerja Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Permerintah Kota Samarinda dari hasil analisis penelitian ini menunjukkan hasil penelitian bahwa (1) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda secara umum dikatakan cukup baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Pendapatan Daerah dengan rata-rata 1,17%. (b) Pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata (positif) 16,75%. (c) Rasio Kemandirian Daerah rata-rata 12,73%. (d) Rasio Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Derajat Desentralisasi menunjukkan rata-rata 11,22%. Dan rasio

efektivitas rata-rata besar dari 100% yaitu 100,37%. (2) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Samarinda secara umum dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Pendapatan Daerah rata-rata 1,10%. (b) Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 18,26%. (c) Keserasian Belanja Daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk Belanja Operasi rata-rata 66,17% dibandingkan dengan Belanja Modal rata-rata 33,79%. (d) Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata-rata dibawah 100% yaitu 76,36%.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk menilai kinerja dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Kupang dengan judul **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017-2021.**

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Kupang**”

1.3. Persoalan Penelitian

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pada Pengelolaan Varians Pendapatan di Kabupaten Kupang selama tahun 2017-2021?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pada Pengelolaan Pertumbuhan Pendapatan di Kabupaten Kupang selama tahun 2017-2021?

3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pada Pengelolaan Varians Belanja di Kabupaten Kupang selama tahun 2017-2021?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Pada Pengelolaan Pertumbuhan Belanja di Kabupaten Kupang selama tahun 2017-2021?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Pada Pengelolaan Efisiensi Belanja di Kabupaten Kupang selama tahun 2017-2021?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pada Pengelolaan Varians Pendapatan di Kabupaten Kupang selama tahun 2017-2021?
 - 2) Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pada Pengelolaan Pertumbuhan Pendapatan di Kabupaten Kupang selama tahun 2017-2021?
 - 3) Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pada Pengelolaan Varians Belanja di Kabupaten Kupang selama tahun 2017-2021?
 - 4) Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pada Pengelolaan Pertumbuhan Belanja di Kabupaten Kupang selama tahun 2017-2021?
 - 5) Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pada Pengelolaan Efisiensi Belanja di Kabupaten Kupang selama tahun 2017-2021?

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademik

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari bangku kuliah dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi serta memperluas wawasan atau sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya serta pengembangan penelitian pada masa mendatang dalam bidang ilmu Manajemen Keuangan Daerah khususnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

2) Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memberikan sumbangan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya/potensi daerah. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk kinerja satuan kinerja perangkat daerah di Kabupaten Kupang agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menentukan arah kebijakan dan strategi didalam perbaikan kinerja dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimasa yang akan mendatang.